

Implementasi Kebijakan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang Penurunan Angka Stunting Melalui Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kota Surabaya

Fara Dina Zachrawan

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: dinafara058@gmail.com

Agus Sukristyanto

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: agussukris@untag-sby.ac.id

Muhammad Roisul Basyar

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: roisulbasyar@untag-sby.ac.id

Korespondensi penulis: dinafara058@gmail.com

Abstract: *The Surabaya City Government has achieved a significant level of success in reducing stunting rates due to the existence of various institutions that help overcome the stunting problem. Therefore, the City of Surabaya is quite good at providing initiatives that meet the objectives. In the process of dealing with the stunting problem, the Surabaya City government launched the latest regulation, namely Mayor Regulation No. 79 of 2022 concerning the acceleration of stunting reduction in the city of Surabaya. This research is qualitative research. Qualitative research is a type of research that applies description and analysis. The results of the research conclusions that have been carried out show that the implementation of Perwali No. 79 of 2022 policy regarding reducing stunting rates through assistance for the first 1000 days of life in the city of Surabaya can be successful because the variables from Michael Hill and Peter Hupe's theory can work well. This is also proven by the existence of the Policy Characteristics variable which is the aim of the policy being passed, namely reducing the stunting rate in the city of Surabaya.*

Keywords: *Government, Stunting, Surabaya*

Abstrak: Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi angka stunting karena adanya berbagai lembaga yang membantu mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, Kota Surabaya cukup baik dalam menyediakan inisiatif yang memenuhi tujuan. Dalam proses menangani masalah stunting, pemerintah Kota Surabaya meluncurkan peraturan terbaru yaitu peraturan Walikota no 79 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di kota Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menerapkan deskripsi dan analisis. Hasil dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan di Kota Surabaya dapat berhasil karena variable dari teori Michael Hill dan Peter Hupe dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya variable Karakteristik Kebijakan yang merupakan tujuan dari disahkannya kebijakan yaitu penurunan angka stunting di Kota Surabaya.

Kata Kunci: Pemerintah, Stunting, Surabaya

LATAR BELAKANG

World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa stunting adalah jika seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Cacat pertumbuhan dan perkembangan ini disebabkan oleh nutrisi yang buruk, infeksi berulang, dan stimulasi

Received Mei 29, 2024; Accepted Juni 22, 2024; Published September 30, 2024

* Fara Dina Zachrawan, dinafara058@gmail.com

psikologis dan sosial yang kurang (zulaikha yuli, 2021). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (2020), Stunting diartikan sebagai kurang dari 2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO dan disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi berulang dalam 1000 HPK (Hari pertama kehidupan). Dengan menggunakan kriteria Z-score yang mana panjang atau tinggi badan anak menurut umur berada di bawah dua standar deviasi, stunting dapat dikategorikan sebagai stunting. Anak stunting dapat terjadi jika bayi di bawah umur lima tahun atau dikenal sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan mengalami kekurangan gizi kronis. Hal ini disebabkan oleh asupan makanan dan nutrisi yang buruk selama jangka waktu yang lama dan terjadi karena asupan makanan yang tidak diatur dan makanan yang diterima si anak tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak.

WHO sendiri menyebutkan bahwa balita yang mengalami stunting akan lebih cenderung mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik hingga kognitif yang kurang optimal dimasa depan. Hal ini dapat ditinjau dari dampak jangka pendek dalam permasalahan stunting dan dampak masa panjang stunting. Perkembangan kognitif yang tidak optimal, verbal hingga motorik-motorik anak, peningkatan biaya kesehatan anak akibat penyakit pun kematian merupakan dampak stunting jangka pendek. Adapun beberapa dampak jangka panjang yang akan dialami oleh balita penderita stunting yaitu anak akan terkena keterbelakangan mental, rendahnya kapasitas berfikir dan belajar sehingga kurang optimal dalam pendidikan, postur tubuh yang kurang optimal saat dewasa yang mana penderita stunting akan lebih pendek daripada balita normal lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, hingga resiko cenderung mudah terkena penyakit lainnya (Wardani et al., 2023)

Salah satu upaya nyata pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka stunting adalah melakukan program intervensi pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Sebagaimana dilaporkan oleh Kementrian Kesehatan, anak-anak stunting dan balita memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terinfeksi penyakit. Bahkan hingga tumbuh kembang sampai dewasa nanti sang anak stunting akan berisiko mendapat penyakit degenerative yang mana merupakan Kumpulan-kumpulan penyakit yang didalamnya akan membuat adanya perubahan fungsi atau beberapa jaringan atau organ (Herdiansah et al., 2023)

Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021, pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan seluruh Lembaga jajarannya berusaha untuk mensukseskan percepatan penurunan stunting. Dalam waktu hanya dua tahun, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengurangi angka stunting balita secara signifikan. Capaian tersebut tidak lepas dari aksi nyata program-program pemerintah dalam melakukan segala upayanya. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan pada tahun 2022, tingkat stunting di Surabaya

sebesar 4,8%. Di mana tingkat stunting rata-rata nasional masih 21%. Sebaliknya, prevalensi stunting di Surabaya pada tahun 2022 hanya sebesar 1,22% berdasarkan bulan penimbangan serentak. Pemkot Surabaya berhasil mengurangi stunting balita secara signifikan dalam waktu kurang dari dua tahun. Kota Pahlawan memiliki 12.788 balita stunting pada tahun 2020. Namun, pada akhir 2022, jumlah ini turun drastis menjadi 923 balita. Sebagai hasil dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, tingkat stunting di Kota Pahlawan telah mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2021, prevalensinya mencapai 28,9% (6.722 balita), tetapi turun drastis menjadi 4,8% pada tahun 2022 (923 balita). Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya mengurangi jumlah bayi stunting. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk mencapai zero stunting dan zero new stunting bahkan pada tahun 2023 (Choliq et al., 2020).

Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai tingkat keberhasilan yang signifikan dalam mengurangi angka stunting karena adanya berbagai lembaga yang membantu mengatasi masalah stunting. Oleh karena itu, Kota Surabaya cukup baik dalam menyediakan inisiatif yang memenuhi tujuan. Dalam proses menangani masalah stunting, pemerintah kota Surabaya meluncurkan peraturan terbaru yaitu peraturan walikota no 79 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di kota Surabaya. Dalam mewujudkan Surabaya zero stunting Adapun sasaran penurunan stunting menurut perwali sasaran penurunan stunting untuk intervensi gizi spesifik yaitu pengutamaan pada keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan yang mana penanganan dimulai dari anak masih dalam kandungan. Dengan meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan, diharapkan para ibu menjadi sadar akan pentingnya memberikan nutrisi yang baik kepada anak mereka dan memantau perkembangan mereka untuk mencegah stunting atau asupan gizi yang buruk (Erlanda & Rahmadanik, 2023).

Pemerintah Surabaya memfokuskan dalam penurunan stunting pada beberapa titik kritis yang diperhatikan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Periode awal yang mana pendampingan pada kandungan ibu hamil atau periode dalam kandungan selama 280 hari. Ibu hamil merupakan kelompok yang rentan akan kebutuhan gizi, oleh sebab itu pemerintah Surabaya sangat aktif dalam pendampingan ibu hamil. Pemenuhan kebutuhan gizi pada masa kehamilan penting dilakukan agar ibu hamil dapat memperoleh dan mempertahankan status gizi terbaik untuk menjalani kehamilan yang sehat, melahirkan bayi dengan kualitas fisik dan mental yang baik, dan memperoleh energi yang cukup untuk kehidupan selanjutnya. Gizi yang dikonsumsi selama kehamilan sangat penting untuk perkembangan janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang sehat dan tidak mengalami masalah gizi atau nutrisi selama kehamilan akan

memiliki bayi yang lebih besar dan lebih sehat daripada ibu hamil lain. Ibu hamil yang kekurangan gizi dapat mengganggu pertumbuhan janin dan menjadi faktor utama dalam terjadinya stunting atau bayi pendek, yang dapat menyebabkan obesitas dan penyakit degenerative pada masa dewasa.

Saat ini Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan arahan kepada semua Perangkat Daerah (PD) seluruh jajarannya hingga TP-PKK Surabaya untuk meyamakan visi-misi dalam mencegah stunting hingga mengantisipasi ibu dan anak meninggal di kota Surabaya. Melansir pada arahan ketua TP-PKK Kota Surabaya dalam melakukan pendampingan ibu hamil selama 280 hari melakukan pendataan dan pengedalian hingga di tingkat RW. Dalam pendampingan gizi ibu hamil pemerintah Surabaya berkolaborasi dengan TP-PKK membuat program Jago Ceting atau jangongan cegah stunting. Dalam program jago ceting ini guna mendukung tentang tujuan pemerintah pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan yang mana program ini mendampingi ibu hamil seperti saat usia 3 bulan melakukan pembagian susu nutrisi bagi ibu hamil. Pembagian susu untuk ibu hamil ini untuk memenuhi nutrisi bagi ibu hamil yang akan dibagikan setiap bulannya. Untuk penerimanya ini pemerintah mendapatkan bantuan dari kader PKK yang mensurvei masyarakat Surabaya hingga di titik RT-RW yang ada ibu hamil (Andita Putri, 2023)

KAJIAN TEORITIS

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe digunakan dalam penelitian ini, dimana mereka mengemukakan bahwa implemetasi kebijakan memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu kebijakan karakteristik, struktur kebijakan, prosedur transfer kebijakan, variabel yang memengaruhi badan pelaksana, hubungan antara organisasi horisontal, respons kelompok sasaran, dan faktor eksternal. Pemilihan dan penggunaan teori Michael Hill dan Peter Hupe ini dapat mempermudah peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perwali NO 79 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Surabaya.

Menurut teori dari Michael Hill dan Peter Hupe, ada sejumlah variabel yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi karakteristik formasi kebijakan, proses transfer kebijakan, pengaruh terhadap badan pelaksana, hubungan horizontal antar organisasi, tanggapan dari kelompok sasaran, serta faktor lingkungan eksternal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang bertumpu pada deskripsi dan analisis mendalam. Pendekatan kualitatif selalu menekankan logika induktif, sebuah metode yang umum digunakan di berbagai disiplin ilmu. Landasan teori digunakan sebagai acuan agar fokus dalam penelitian sesuai dengan fakta. Aturan berpikir dasar dan asumsi dasar yang akan digunakan dalam penelitian disusun pada awal proses penelitian. Dalam pengumpulan dan pengolahan data, aturan berpikir dan asumsi selanjutnya diterapkan secara sistematis ini memungkinkan penjelasan dan argumen. Informasi yang dikumpulkan dan diproses dalam penelitian kualitatif harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri.

Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami dari fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, motivasi, tindakan, dll., secara menyeluruh dan deskriptif dengan menggunakan berbagai metode alamiah dalam konteks alami. Penelitian kualitatif berfokus pada kualitas daripada kuantitas, dan semua informasi dan data berasal dari observasi langsung, wawancara, dan dokumen resmi lainnya yang relevan. Selain itu, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hubungan antar elemen yang diteliti akan lebih mudah dipahami saat proses dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui hasil wawancara, observasi dan pembahasan yang dilaksanakan dalam penelitian ini yang mana digunakan untuk tujuan untuk menghasilkan pembahasan yang akan dijabarkan dibawah ini. Untuk memahami implementasi kebijakan tentang percepatan penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan, penjabaran dari teori implementasi kebijakan dari Michael Hill dan Peter Hupe dapat digunakan. Teori ini memiliki 7 (tujuh) variable indikator, dan hasil penelitian akan dibahas dibawah ini:

Penurunan Stunting

Stunting dalam pengertian World Health Organization (WHO) adalah anak-anak yang kekurangan stimulasi psikologis dan sosial, gizi buruk, dan infeksi berulang yang menyebabkan cacat pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini terjadi karena pada waktu 1000 Hari Pertama Kehidupan segala yang dibutuhkan untuk pemenuhan gizi tidak terpenuhi. Salah satu hal penting dan perlu diperhatikan untuk mencegah stunting adalah mendapatkan kesehatan dan nutrisi yang baik selama kehamilan. Hal ini penting karena pada saat kehamilan tentu bayi didalam kandungan memerlukan nutrisi yang cukup.

Karena kekurangan gizi pada saat 1000 HPK bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki, stunting dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan kesehatan anak pada saat dewasa. Karena stunting juga memiliki efek jangka panjang yang buruk, pemerintah berkonsentrasi pada pencegahan dan penurunan stunting. WHO sendiri menyebutkan bahwa Balita stunting lebih cenderung mengalami masalah di masa depan dalam hal perkembangan fisik dan kognitif. Hal ini dapat ditinjau dari dampak jangka pendek dalam permasalahan stunting dan dampak masa panjang stunting. Perkembangan kognitif yang tidak optimal, verbal hingga motorik-motorik anak, peningkatan biaya kesehatan anak akibat penyakit pun kematian merupakan dampak stunting jangka pendek. Adapun beberapa dampak jangka panjang yang akan dialami oleh balita penderita stunting yaitu anak akan terkena keterbelakangan mental, rendahnya kapasitas berfikir dan belajar sehingga kurang optimal dalam pendidikan, postur tubuh yang kurang optimal saat dewasa yang mana penderita stunting akan lebih pendek daripada balita normal lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, hingga resiko cenderung mudah terkena penyakit lainnya

Di Indonesia sendiri tidak sedikit faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting yaitu ada beberapa faktor, seperti kekurangan gizi, kelaparan terselubung, dan berat badan berlebih, yang mengancam kehidupan dan pertumbuhan anak yang buruk sehingga dapat mengancam perkembangan suatu bangsa. Pada masa emas, atau 1000 Hari Pertama Kehidupan, pencegahan stunting sangat penting. Periode awal 1.000 Hari Pertama Kehidupan dikenal sebagai periode emas atau *window of opportunities*.

Pemerintah Surabaya memfokuskan dalam penurunan stunting pada beberapa titik kritis yang diperhatikan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Periode awal pendampingan ibu hamil atau 280 hari dalam kandungan. Ibu hamil merupakan kelompok yang rentan akan kebutuhan gizi, oleh sebab itu pemerintah Surabaya sangat aktif dalam pendampingan ibu hamil. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil selama kehamilan, sangat penting untuk mempertahankan status gizi yang ideal agar ibu hamil dapat menjalani kehamilan dengan baik, melahirkan bayi dengan kualitas fisik dan mental yang baik, dan memperoleh energi yang cukup untuk kehidupan selanjutnya. Gizi yang baik selama kehamilan juga sangat penting untuk pertumbuhan janin yang dikandungnya.

Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022

Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Alasan disahkan peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi wadah pemerintah Kota Surabaya dalam mengentaskan permasalahan stunting yang ada di Kota Surabaya. Untuk mewujudkan Surabaya zero stunting adapun

sasaran penurunan stunting menurut perwali No 79 Tahun 2022. Sasaran penurunan stunting untuk intervensi gizi spesifik yaitu pengutamaan pada keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan yang mana penanganan dimulai dari anak masih dalam kandungan. Kemiskinan yang meningkat adalah salah satu dampak stunting di Kota Surabaya. sehingga banyak yang kekurangan gizi sebagai penunjang bayi, serta dari 2019 hingga 2022, prevalensi stunting awal telah berkurang. Pemerintah Kota Surabaya telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup besar dalam mengurangi angka stunting di kota tersebut, berkat kontribusi berbagai lembaga yang membantu menyelesaikan masalah stunting. Oleh karena itu, Kota Surabaya cukup efisien dalam menyediakan program yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, disahkannya Peraturan walikota No 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan memiliki memulai intervensi penurunan angka stunting dimulai dari:

1. Sosialisasi dan pemberian tabelt penambah darah bagi remaja putri
2. Pemeriksaan dan sosialisasi kepada calon pengantin tentang Kesehatan
3. Pendampingan dan pemberian Vitamin pada ibu hamil
4. Pemeriksaan bayi dimulai dari usia 0-59

Peraturan walikota no 79 tahun 2022 tentang penurunan angka stunting menjelaskan bahwa stunting dapat diatasi dimulai pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi ini dimulai dari pemberian dan sosialisasi kepada remaja putri tentang pentingnya Tabelt penambah darah guna menambah nutrisi dan mencegah terkena kekurangan energi kronis nantinya. Intervensi ini dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada calon pengantin tentang kesehatan seperti pengukuran lengan atas, indeks masa tubuh calon pengantin. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah calon pengantin memiliki resiko kekurangan gizi ataupun kekurangan energi kronis sehingga dapat diantisipasi sedini mungkin. Selain itu Pemerintah kota juga memberikan sosialisasi kepada calon pengantin melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan yang mana catin akan mendapatkan pelayanan gizi, Kesehatan hingga dapat melakukan konseling.

Intervensi spesifik penurunan stunting dilakukan sebelum dan sesudah kelahiran. Tingginya ibu hamil dengan kondisi gizi yang kurang dan memiliki anemia menjadi salah satu alasan dilakukannya intervensi sejak dalam kandungan. Implementasi Kebijakan peraturan walikota ini diberlakukan sebagai salah satu Upaya pemerintah untuk lebih serius dalam penurunan angka stunting. Jumlah balita stunting pada awal November tahun 2023 menurun menjadi 418 balita. Hal ini menjadi salah satu prestasi Pemerintah Kota Surabaya karena berhasil menurunkan jumlah anak stunting secara signifikan.

Seperti yang dinyatakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe (2002) dalam *Journal of Social Policy*, Implementasi Politik Publik. Implementasi dipahami sebagai sesuatu untuk melaksanakan, memenuhi, mencapai, menyelesaikan dan menghasikan sesuatu sesuai dengan tujuannya. Friedrich menjelaskan implementasi sebagai langkah konkrit yang dilakukan untuk mewujudkan proposal dari individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, seringkali dihadapkan pada tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga secara garis besar, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai Tindakan yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan yang mana telah diatur dan direncanakan sebelumnya dalam pengambilan Keputusan.

Proses implementasi kebijakan melibatkan beberapa tahapan. Tahapan awal dalam proses implementasi kebijakan adalah pengesahan peraturan, pelaksanaan instansi, dampak kebijakan serta upaya perbaikan dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan peraturan walikota no 79 tahun 2022 tentang penurunan angka stunting melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan ini sudah disosialisasikan oleh pemerintah Surabaya hingga melibatkan banyak pihak.

Kebijakan penurunan angka stunting melalui program 1000 hari pertama kehidupan ini disosialisasikan kepada Masyarakat Kota Surabaya tidak hanya kepada Masyarakat yang memiliki anak saja. Penurunan stunting melalui program 1000 hari pertama kehidupan ini menekankan tentang pemenuhan gizi bayi sejak dalam kandungan, sehingga pemerintah juga melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kepada ibu hamil. Penanganan ini sangat tepat dimana angka kematian ibu dan bayi menurun. Pemberian nutrisi selama dalam kandungan dan dalam tahun pertama kehidupan seorang menjadi salah satu modal yang penting untuk perkembangan otak dan pembentukan system kekebalan tubuh.

Tabel 1 Angka Kematian Ibu dan Bayi

No	Tahun	Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Anak
1.	2021	17	199
2.	2022	16	174

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Penurunan ini menjadi salah satu bukti bahwa ibu hamil sangat memerlukan nutrisi agar tidak menimbulkan dampak kematian. Pemerintah Kota Surabaya menyadari bahwa masalah nutrisi ini dapat diatasi dengan memfokuskan penanganan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Oleh karena itu Peraturan Walikota no 79 tahun 2022 tentang penurunan stunting melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan ini sangat tepat.

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 di Kota Surabaya

Berdasarkan hasil penelitian dan penyajian data yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang Penurunan Angka

Stunting Melalui Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam proses implementasinya di Kota Surabaya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Dengan bertumpu pada proses implementasi yang telah berjalan dengan lancar dan baik, maka dapat di lihat dari penjabaran teori Michael Hill dan Peter Hupe sebagai berikut:

Karakteristik Kebijakan

Aturan mengenai penurunan angka stunting di kota Surabaya secara umum telah diatur dalam Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Dalam peraturan walikota ini pemerintah kota memberikan intervensi tentang program dalam penurunan angka stunting melalui intervensi sensitive dan intervensi spesifik. Dalam indikator ini, secara garis besar adalah melihat apakah kebijakan ini memiliki tujuan yang dapat membawa dampak baik bagi Masyarakat Karakteristik Kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah tujuan dari kebijakan tersebut disusun. Dengan diterbitkannya kebijakan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 ini apakah tujuan dibuatnya memang benar guna mempercepat dalam penurunan angka stunting di Kota Surabaya.

Karakteristik kebijakan tentang Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang Penurunan Angka Stunting Melalui Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan sudah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tujuan dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kota Surabaya. Dimana di tahun 2023 angka stunting yang ada di Kota Surabaya menurun drastis. Menurut Sumber data Dinas Kesehatan Kota Surabaya jumlah balita stunting hanya sekitar 418 balita. Dengan penurunan angka stunting ini membuktikan bahwa tujuan dari kebijakan ini telah berhasil

Pada indikator ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Nisa et al., 2022) yang dimana indikator ini menjelaskan bahwa karakteristik kebijakan merupakan tujuan dari dibuat dan disahkannya kebijakan itu sendiri. Kebijakan ini memiliki tujuan agar Masyarakat perkotaan memiliki ketersediaan parkir yang memadai dan teratur. Selain digunakan sebagai pengaturan penertiban parkir, kebijakan ini dapat dijadikan untuk membantu meningkatkan pendapatan daerah, dimana hal ini juga membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian,

Pada penelitian terdahulu, persamaan dari indikator teori Michael Hill dan Peter Hupe adalah kesamaan dalam kejelasan Karakteristik Kebijakan, penelitian terdahulu menjelaskan tentang tujuan diadakan retribusi parkir selain untuk mengurangi angka kemacetan juga menjadi salah satu pemasukan daerah. Dalam kebijakan peraturan Walikota No 79 Tahun 2022

Tentang penurunan angka stunting ini memiliki tujuan untuk menurunkan angka stunting di Kota Surabaya dengan menggunakan program Pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Formasi Kebijakan

Dalam teori Michael Hill dan Peter Hupe, formasi kebijakan merupakan salah satu variable penting dalam proses implementasi kebijakan. Formasi kebijakan menjadi elemen esensial karena dibentuk berdasarkan struktur dan detail kebijakan yang meliputi aspek-aspek penting yang memengaruhi implementasi serta hasil akhir dari kebijakan tersebut. Tujuan dan ukuran dari sebuah kebijakan yang jelas dan terarah serta sumber daya yang mendukung akan menjadikan sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dalam formasi kebijakan ini, hal yang paling penting yang membentuk formasi kebijakan adalah ukuran kebijakan, insentif dan sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan ini berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia ini dapat disebutkan dari orang-orang yang terlibat, seperti pegawai dari Dinas Kesehatan, pegawai Dinas Sosial dan seluruh orang yang terlibat. Untuk sumber daya finansial dari peraturan kebijakan ini adalah anggaran yang di gelontorkan dari pemerintah untuk mensukseskan tujuan ini.

Pada indikator ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Andita Putri, 2023) yang dimana penelitian terdahulu tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi stunting melibatkan multisectoral yang terdiri dari sektor Kesehatan, social dll. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya cukup sukses dalam menurunkan stunting karena formasi kebijakan yang stabil dimana jajaran instansi yang terlibat turun serta da;am memberikan solusi dan mampu menekan penurunan naka stunting dengan menjalankan program-program yang ada. Di dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa penurunan stunting sukses karena baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial memadai.

Dalam penurunan angka stunting sesuai dengan penelitian ini dimana kebijakan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang penurunan angka stunting tidak hanya berfokus pada sumber daya finansial saja melainkan sumber daya manusia, karena dalam implementasi penurunan angka stunting, penanganan kepada balita yang terkena stunting harus di tangani secara langsung. Sesuai dengan penelitian terdahulu (Andita Putri, 2023) yang mana kesuksesan dalam penurunan angka stunting karena keterlibatan multi sectoral. Hal inilah yang menjadikan tujuan dari kebijakan peraturan walikota dapat diraih. Sejalan dengan penurunan angka stunting yang semakin tahun semakin menurun dimana pada tahun 2023 penurunan angka stunting menyentuh di 418 balita saja.

Proses Transfer Kebijakan

Dalam proses implementasi kebijakan, ada salah satu faktor yang juga mempengaruhi proses keberhasilan. Proses transfer kebijakan memegang peranan krusial dalam keberhasilan suatu kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Michael Hill dan Peter Hupe, proses transfer kebijakan memiliki signifikansi yang besar karena setiap tahapan pelaksanaan memiliki pengaruh yang berdampak pada hasil akhir dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan Kebijakan juga mengimplementasikan kebijakannya oleh implementor dari berbagai level atau tingkatan sehingga diperlukan transfer kebijakan yang tepat.

Dalam proses transfer kebijakan mengenai penurunan stunting ini, alur penurunan kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya utamanya langsung diturunkan dan dipusatkan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dinas Sosial dan stakeholder yang terkait. Dinas Kesehatan Kota Surabaya memegang kendali dalam transfer kebijakan yang telah diturunkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Pada indikator ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Andita Putri, 2023) dijelaskannya didalam penelitian terdahulu bahwa percepatan penurunan stunting memiliki tim sendiri. Tim percepatan penurunan stunting memiliki tingkatan dimana tim Tingkat kabupaten/kota yang mana terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, dimana termasuk Tim TP-PKK. Lalu turun hingga tim Tingkat kelurahan/ desa dimana termasuk PKK hingga KSH. Sehingga penelitian ini pun sama dengan indikator dari Michael Hill dan Peter Hupe dimana implementasi Kebijakan memiliki proses untuk mentransfer sebuah kebijakan secara vertical.

Pada implementasi kebijakan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang Penurunan angka stunting ini telah memiliki susunan untuk penanganan penurunan angka stunting. Dimana alur penurunan kebijakan diturunkan langsung pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang nanti akan diteruskan kepada jajaran dibawahnya. Proses transfer kebijakan yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan walikota no 79 tahun 2022 ini sudah sesuai dengan teori Michael Hill dan Peter Hupe. Tenaga Kesehatan Puskesmas Tingkat kelurahan, KSH dan PKK tentunya dibawah naungan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kota Surabaya (Sri & Fatimah, 2023).

Faktor yang Mempengaruhi Badan Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh perilaku karyawan Garda Tengah. Faktor Ini berkaitan dengan proses transfer kebijakan. Birokrat garda terdepan merupakan inti dari sumber daya manusia yang memiliki tanggung jawab langsung dalam

pelaksanaan kebijakan dan upaya untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka berperan sebagai ujung tombak dalam menjalankan kebijakan untuk menghasilkan dampak yang diharapkan. Birokrat garda terdepan menunjukkan komitmen dengan turun langsung ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan kelompok sasaran. Melalui intervensi mereka secara langsung terhadap tujuan kebijakan, mereka memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan keberhasilan keseluruhan dari implementasi kebijakan tersebut.

Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah diberikan tugas oleh Pemerintah Kota untuk mengentaskan permasalahan stunting sesuai dengan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 dimana Dinas Kesehatan Kota Surabaya terdapat struktur yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani stunting. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dijalankan dengan baik. Dinas Kesehatan Kota Surabaya memiliki bidang tim Kesehatan Keluarga yang menangani tentang kasus dimulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan. Acuan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam menurunkan stunting tentu menggunakan acuan dari Peraturan walikota No 79 Tahun 2022 (Eka Putri & Puspaningtyas, 2024).

Dalam penelitian sebelumnya sesuai dengan indikator Michael Hill dan Peter Hupe tentang Faktor yang Mempengaruhi Badan Pelaksana (Rosa Sunaryo & Arifianti, n.d.) dimana yang mempengaruhi badan pelaksana merupakan hal-hal yang terlibat didalam proses penurunan. Dalam penelitian ini terfokus pada sumber daya pengaruh keanggotaan implementor dalam penurunan angka stunting yang mana terdiri dari Kepada Dinas Kesehatan yang terdiri dari berbagai unsur dan aspek. Hal ini juga sesuai dengan indikator dari Teori Michael Hill dan Peter Hupe tentang faktor yang mempengaruhi badan pelaksana juga dilihat dari proses transfer kebijakan.

Kota Surabaya dengan prestasinya dalam penurunan angka stunting tentu tidak lepas dari instansi-instansi yang memiliki peran. Dalam penelitian ini, tentu tanggung jawab penuh dalam penurunan angka stunting dibebankan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Surabaya memiliki tim sendiri untuk menangani stunting dan memberikan intervensi secara sensitive dan spesifik. Dalam melakukan intervensi ini Dinas Kesehatan Kota Surabaya dibantu oleh beberapa Pihak seperti Puskesmas, PKK hingga KSH. Sehingga kebijakan ini sangat cocok diturunkan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Hubungan Inter-Organisasi Horizontal

Hubungan inter-organisasi horizontal merupakan salah satu faktor yang dimana melakukan Kerjasama antar organisasi yang setara atau tidak berhierarkie dalam pertanggungjawabannya. Dapat dikatakan dalam implementasi kebijakan ini Dinas Kesehatan

Kota Surabaya bekerja sama dengan Lembaga yang memiliki kewenangan yang setara. Penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus utama bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, karena hal itu maka Dinas Kesehatan membutuhkan kerja sama dari beberapa Lembaga yang setara.

Hubungan Inter-Organisasi Horizontal dalam Teori Michael Hill dan Peter Hupe merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan kebijakan peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang Penurunan angka stunting. Hubungan dengan Lembaga yang memiliki kewenangan yang sejajar dibutuhkan untuk melakukan intervensi lanjutan. Hal ini dibuktikan didalam implementasi ini Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Sosial, DP3APPKB, Kemenag untuk melakukan intervensi. Lembaga tersebut memiliki tugas dan kewenangan sendiri dalam program penurunan angka stunting sesuai dengan kebijakan yang ada.

Pada indikator ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Rosa Sunaryo & Arifianti, n.d.) sesuai dengan indikator dari Teori Michael Hill dan Peter Hupe. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan telah melakukan kebijakan penurunan angka stunting dengan baik. Dimana mereka bekerja sama dengan OPD lain yang mana mereka menjalankan tupoksi masing-masing dengan serius. Tindakan konkret seperti sosialisasi bimbingan teknis (bintek) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada guru PAUD bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali serta mencegah kasus stunting pada anak usia dini, Dinas Sosial memberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berupa paket sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara Dispackan memberikan bantuan kepada 4000 anak yang mengalami stunting di Kabupaten Bandung. Hal ini membuktikan bahwa penelitian (Rosa Sunaryo & Arifianti, n.d.) telah sesuai dengan teori Michael Hill dan Peter Hupe.

Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah mengkoordinasikan kepada OPD dan Lembaga-lembaga yang setara tentang intervensi yang akan dilakukan. Dalam Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 tentang penurunan stunting, pemerintah menggunakan program 1000 Hari Pertama Kehidupan yang mana tentu membutuhkan bantuan dari Lembaga yang lain. Seperti halnya untuk intervensi sensitive untuk masalah ekonomi yang mana nantinya akan ditinjau lanjuti oleh Dinas Sosial. Dan untuk pencegahan melahirkan balita stunting karena ibu bayi yang kekurangan energi Kronis akibat kurang umur maka bekerja sama dengan Kemenag untuk mengatur kebijakan pernikahan dini.

Respon Kelompok Sasaran

Faktor ini memengaruhi kebijakan regulator, yang memengaruhi pihak berkepentingan. Negosiasi atau tawar menawar antara pemerintah dan pihak berkepentingan ini kemudian terjadi. Namun, pada penelitian kali ini sasaran yang dituju merupakan pihak individu maka perlu ditekankan lagi perilaku birokrat garda terdepan untuk mengimplementasikannya. Implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh respons aktor implementer yang lemah.

Dapat disimpulkan menurut Teori Michael Hill dan Peter Hupe ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebuah kebijakan. Begitupun dengan Implementasi Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan tentu ada beberapa faktor yang paling berperan dalam keberhasilannya. Salah satunya yaitu respon Kelompok sasaran. Dalam penelitian ini sikap Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam melakukan intervensi merupakan pionir dalam kesuksesan program. Apabila Dinas Kesehatan tidak serius dalam menjalankan program penurunan angka stunting dimana menggunakan program 1000 Hari Pertama Kehidupan maka kebijakan ini tidak akan berhasil.

Oleh sebab itu, pada indikator ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Fernandez et al., n.d.) yang dimana dijelaskan bahwa Respon kelompok sasaran merupakan hal yang terpenting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang ada dalam proses pengimplementasian kebijakan. Salah satu masalah yang terjadi adalah dalam proses implementasinya tenaga Kesehatan dan motivasi dari kader yang terlibat masih kurang sehingga menyebabkan kondisi masyarakat kurang akan pengetahuan dan pencegahan stunting. Apabila hal ini terjadi tentu akan menimbulkan masalah dalam mencapai tujuan disahkannya suatu kebijakan itu sendiri.

Pada implementasi kebijakan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang penurunan angka stunting ini, pemerintah Surabaya menegaskan kepada seluruh implementor yang terlibat untuk serius dalam menangani stunting. Salah satu upaya pemerintah adalah memberikan hak penuh kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan intervensinya kepada masyarakat Surabaya. Pemerintah kota Surabaya juga meminta para implementor Tingkat kelurahan untuk terus melakukan survei dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting, sehingga mereka mampu menghindar dari permasalahan stunting. Dalam kebijakan ini, pemerintah melakukan program nya melalui 1000 Hari Pertama Kehidupan dimana dimulai dari bayi masih didalam kandungan. Oleh sebab itu dalam implementasinya diperlukan keseriusan dalam seluruh pihak.

Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor terakhir menurut Hill dan Hupe yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor lingkungan eksternal. Kebijakan dapat secara efektif menangani masalah yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang terdiri dari ekonomi, politik hingga lingkungan social. Lingkungan tidak kondusif dapat menyebabkan kegagalan dari suatu kebijakan.

Upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan penurunan angka stunting di tuangkan dalam Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan. Peraturan ini memberikan kewenangan pada Dinas Kesehatan dalam melakukan intervensi, baik intervensi internal maupun eksternal. Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga bekerja sama dengan beberapa Lembaga untuk menjalankan intervensinya seperti Dinas Sosial dan Kementrian Agama. Pada program Dinas Sosial adalah pemberian bantuan PKH serta Kemenag mengeluarkan pencegahan pernikahan dini dengan tidak mengizinkan pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan untuk mengurangi dampak lahirnya bayi stunting. Dalam hal ini, peraturan-peraturan untuk mengurangi stunting merupakan peraturan yang wajib dan mutlak untuk diikuti oleh Masyarakat.

Pada indikator ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Fernandez et al., n.d.) dimana kebijakan yang diterapkan terdapat indikator Faktor Lingkungan Eksternal sesuai dengan Teori Michael Hill dan Peter Hupe. Lingkungan eksternal merupakan salah satu hal terpenting untuk mencapai tujuan kebijakan. Didalam penelitian terdahulu ini kepatuhan dan tanggap masyarakat adalah hal yang penting. Hal ini dibuktikan dengan kurang tanggap dan patuhnya masyarakat terhadap kebijakan yang ada menjadikan kebijakan ini tidak berjalan maksimal. Penelitian ini menjelaskan meskipun telah diadakan sosialisasi, pendampingan bahkan pemberian bantuan pun jika tidak ada kepatuhan dan respon baik dari masyarakat maka programnya tidak akan berjalan. Penelitian ini menjelaskan orang tua anak stunting masih sulit untuk menerapkan pola hidup sehat. Jika sosialisasi dan pengarahan tidak dilakukan secara paksa maka patuhnya masyarakat akan kurang.

Dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota No 79 Tahun 2022 Tentang penurunan angka stunting ini menggunakan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan. Dimana intervensi yang dilakukan merupakan intervensi wajib yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadikan masyarakat terikat dan tidak bisa menolak segala intervensi yang ada. Seperti adanya pemeriksaan tinggi badan balita atau pemeriksaan Kesehatan ibu hamil di tiap bulannya masyarakat wajib mengikuti semua pemeriksaan. Hal ini

dimaksudkan apabila ada ciri-ciri stunting maka akan dengan cepat ditangani. Kesuksesan dari program ini juga dapat dilihat dari penyajian data bahwa data balita stunting per tahunnya semakin menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perwali No 79 Tahun 2022 tentang penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan di Kota Surabaya dapat berhasil karena variable dari teori Michael Hill dan Peter Hupe dapat berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan variable Karakteristik Kebijakan yang merupakan tujuan dari disahkannya kebijakan yaitu penurunan angka stunting di Kota Surabaya. Variable selanjutnya yaitu formasi kebijakan (*policy formation*) dalam implementasi kebijakan ini dapat dikatakan terpenuhi sehingga angka balita stunting di tiap tahunnya mengalami penurunan. Variable Proses transfer kebijakan diatur dengan baik dan terarah sehingga mampu mengimplementasikan peraturan walikota sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu variable faktor yang mempengaruhi badan pelaksanapun sudah diketahui dengan baik, dimana setiap implementor yang terlibat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan tujuan dari peraturan walikota. Hal ini dapat dilihat dari hubungan inter-organisasi Horizontal dimana setiap OPD atau lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dengan Dinas Kesehatan turut membantu dalam melakukan intervensi penurunan angka stunting. Selanjutnya respon kelompok sasaran dalam pengimplementasian kebijakan ini sangat tegas sehingga dapat mempengaruhi Faktor lingkungan eksternal dimana masyarakat yang dilakukan implementasi tidak bisa menolak intervensi yang ada.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang implementasi kebijakan perwali no 79 tahun 2022 tentang penurunan angka stunting melalui pendampingan 1000 hari pertama kehidupan di kota surabaya, penulis memiliki saran dimana kebijakan ini dapat direalisasikan oleh kota lain dalam upaya penurunan stunting. dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa kota surabaya berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan ini. salah satu keberhasilan Kota Surabaya dalam mengimplementasikan kebijakan ini karena dalam proses transfer kebijakan yang dilakukan secara langsung dan tegas sehingga para implementor dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik. Selain itu dalam melakukan intervensi-intervensi kepada masyarakat faktor yang mempengaruhi badan pelaksana juga merupakan salah satu kunci untuk suksesnya implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, penulis menyarankan apabila kota lain ingin melakukan realisasi bisa menjadikan Kota Surabaya sebagai acuan

DAFTAR PUSTAKA

- Andita Putri, N. (2023). Implementasi kebijakan penurunan stunting di Kota Surabaya (Studi Kecamatan Bubutan). *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 3(3), 52–63.
- Cholih, I., Nasrullah, D., Kesehatan, F. I., & Surabaya, U. M. (2020). Pencegahan stunting di Medokan Semampir Surabaya melalui modifikasi makanan pada anak. *HMN*, 1(1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/HMN>
- Eka Putri, S., & Puspaningtyas, A. (2024). Implementasi program sekolah orang tua hebat dalam mewujudkan balita tanpa stunting di Kelurahan Karangpoh Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).
- Erlanda, V., & Rahmadanik, D. (2023). Strategi pemerintah Kota Surabaya dalam upaya percepatan penurunan stunting. *Jurnal Aplikasi Administrasi*, 26(2).
- Fernandez, D., Long, B. L., Oktafiana Rene, M., & Ilmu Sosial Dan, F. (n.d.). Implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kupang. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.9723>
- Herdiansah, A., Nur, S., Ahmad, A., Daniarti, Y., Wijayanti, R. R., Ibrahim, M., & Saifullah, A. (2023). Sosialisasi cegah stunting dan aplikasi pencegahan stunting bagi masyarakat Kelurahan Poris Jaya Kota Tangerang. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service*, 4(2). <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v4i2.3338>
- Nisa, K., Sukarno, D., & Buchori, A. (2022). Implementasi kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir tunai di kawasan Taman Dewi Sartika pelataran Balai Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 13(Februari).
- Rosa Sunaryo, D., & Arifianti, R. (n.d.). Implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung. *CNN Indonesia*, 4. www.cnnindonesia.com
- Sri, N., & Fatimah, M. (2023). Efektivitas aplikasi Sayang Warga sebagai penunjang kinerja kader Surabaya Hebat. *Prosiding Seminar Nasional*, 498–508.
- Wardani, N. E. K., Harumi, A. M., & Sholikah, S. M. (2023). Analysis of the 1000 HPK program (first day of life) towards effort to reduce stunting at the Bangkalan District Health Center. *Malahayati Nursing Journal*, 5(4), 969–986. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i4.8242>